

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang pelaku sejarah sangatlah penting, merekalah yang menciptakan rentan-rentan peristiwa sejarah yang terjadi, semua hal tersebut merupakan hasil perbuatan manusia yang dipengaruhi oleh pemikiran manusianya, mengingat manusia tidak lepas dari dunia pemikiran manusianya, mengingat manusia tidak bisa lepas dari dunia pemikirannya. Kajian sejarah pemikiran memiliki tugas diantaranya, yaitu Pertama mengkaji pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kajian sejarah. Kedua, mengkaji konteks sejarah dengan melihat latar belakang pemikiran melalui tempat tinggal serta lingkungan yang berpengaruh. Ketiga, mengkaji pengaruh pemikiran di masyarakat (Kuntowijoyo, 2003).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia sebagai tonggak awal sejarah baru yang telah ditorehkan meninggalkan jejak-jejak perjuangan para pahlawan yang turut andil dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Salah satunya adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Beliau adalah salah satu dari tiga Jenderal Besar yang ada di Indonesia, melalui gagasan pemikiran dan karya- karyanya telah berkontribusi banyak terhadap perkembangan dalam membangun tentara nasional Indonesia (TNI) secara khusus juga bangsa Indonesia dalam bidang sosial politik pada dasawarsa 1950-1970 an.

Nama besar Jenderal A.H Nasution tidak hanya dikenal sebagai Pahlawan Nasional yang merupakan Jenderal bintang lima, lebih dari itu Ia merupakan salah satu peletak dasar-dasar ketentaraan nasional, beliau juga merupakan salah satu tokoh yang ikut terlibat dalam membentuk

Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 yang hingga kini diperingati sebagai hari kelahiran Tentara Nasional Indonesia, disamping itu beliau juga merupakan pelaku sejarah yang terlibat dalam banyak peristiwa krusial yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia (Nasution D. A., 1983).

Pada masa demokrasi terpimpin, sebagai babak baru hubungan Presiden Soekarno dan Jenderal Nasution, beliau mendorong perwira militer untuk terlibat aktif dalam politik sebagai langkah untuk membendung pengaruh PKI yang kian membesar. Melalui pidatonya di Akademi Militer Nasional di Magelang pada 1958 beliau memperkenalkan konsep Jalan Tengah yaitu konsep mengenai sikap dan posisi tentara Indonesia dalam pemerintahan, menurutnya Jalan Tengah dimaksudkan agar ABRI tidak dalam kendali sipil dan juga tidak boleh mendominasi pemerintahan (Sundhaussen, 1986).

Makna dari pidato tersebut merupakan penjelasan beliau mengenai posisi tentara dalam masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh militer sebagai perseorangan untuk turut aktif menyumbangkan tenaganya diluar bidang militer, yaitu turut menentukan kebijakan negara pada tingkat-tingkat tertinggi seperti pada bidang finansial-ekonomi (Said, 2001).

Konsep yang disampaikan beliau sampai saat ini menjadi bahan kajian yang terus dibicarakan sebagai embrio dari dwifungsi ABRI. Beliau berpendapat bahwa dalam negara pancasila, tentara Indonesia mempunyai posisi dan peranan sebagai salah satu kekuatan sosial revolusi Indonesia, yang bahu membahu dengan kekuatan sosial lainnya mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia (Nasution, 1985), beliau menekankan ABRI sebagai stabilisator, ABRI hanya perlu ikut pembinaan negara bukan untuk mendominasi atau memonopoli kekuasaan.

Gagasan Nasution Selanjutnya di masa parlementer menginginkan

kembalinya Kepada UUD 1945 yang menarik perhatian Presiden Soekarno yang di kemudian hari diwujudkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bermula dari kekecewaan keduanya terhadap Partai Politik, yang mana ketika itu Politisi Sipil dianggap lebih mementingkan kepentingan Partai ketimbang kepentingan Nasional secara luas (Nasution J. A., 1984).

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimulailah era dimana perwira-perwira militer memasuki pemerintah dengan diangkatnya menjadi Menteri di masa PM Juanda. Dimasa inilah sebagai awal mula keterlibatan militer secara legal di dunia perpolitikan Nasional. Untuk memperkokoh kekuasaannya Presiden Soekarno tentu membutuhkan dukungan militer untuk membendung partai politik (Said, 2001).

Hubungan Presiden Soekarno dengan Militer mulai merenggang pasca diberlakukannya gagasan Nasakom dimana Militer (AD) kurang sepakat dengan keterlibatan PKI karena memiliki sejarah kelam di masa Revolusi diawal kemerdekaan. Faktor selanjutnya setelah kokohnya kekuasaan Presiden Soekarno, beliau memecat KASAD Jenderal Nasution dengan menendangnya ke atas sebagai KASAB (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) tanpa jalur komando yang jelas dan hanya ditugasi mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Hal ini dianggap sebagai upaya Presiden Soekarno untuk menyingkirkan Jenderal Nasution (Said, 2001, p. 67).

Kekuasaan Presiden Soekarno yang tak terbatas, banyak bertindak dengan menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan membubarkan Partai-partai yang dianggap merongrong kekuasaan. Dengan ditetapkannya Presiden Soekarno melalui TAP MPR No 3/1963 yang mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup kekuasaan eksekutif maupun legislatif sepenuhnya di bawah genggaman Presiden Soekarno.

Puncak dari Demokrasi Terpimpin terjadi pasca Gerakan 30

September (G30S/PKI) dengan tewasnya 7 Perwira Angkatan Darat. Hal ini menimbulkan krisis politik yang diwarnai dengan demonstrasi mahasiswa salah satunya menuntut pembubaran PKI.

Dalam keadaan terdesak pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar kepada Jenderal Soeharto, yang langsung bertindak memenuhi tuntutan Tritura, dengan membubarkan PKI dan menahan beberapa Pejabat Pemerintah yang dianggap terlibat G30S/PKI. Hal ini mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari Mahasiswa dan para korban kesewenangan Presiden Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin.

Parlemen pun diamankan Tentara pasca pimpinannya Chaerul Saleh dianggap Terlibat G30S PKI dengan menunjuk Kolonel Wiluyo Puspojudo sebagai Ketua MPRS. Pemilihan Ketua MPRS tidak lama digelar dengan Terpilihnya Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS pada 21 Juni 1966 (Sundhaussen, 1986).

Dengan banyaknya dukungan pada militer dari berbagai pihak dan peran Strategis Jenderal Nasution di Parlemen serta wewenang eksekutif yang berada dibawah Jenderal Soeharto pada akhirnya Presiden Soekarno lengser dari kekuasaannya setelah MPRS menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soehartosebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967.

Keterlibatan Militer dalam dunia perpolitikan nasional di masa peralihan orde lama menuju orde baru mendapat apresiasi yang gemilang karena dianggap mampu memberikan solusi di tengah persoalan sosial politik dan ekonomi yang tak menentu (p. 54).

Penulis Menguraikan secara kronologis rentetan peristiwa yang terjadi dari tahun 1958 sampai 1971. Adapun alasan penulis mengambil tahun 1958 karena pada 11 November 1958 pada acara ulang tahun Akademi Militer Ke-1 di Magelang, melalui pidato tanpa teks Jenderal

A.H Nasution mencetuskan ide mengenai Konsep Jalan Tengah yang dianggap sebagai embrio Dwifungsi ABRI. Selanjutnya penulis mengambil tahun 1971 ini bertepatan dengan pensiunnya Jenderal A.H Nasution sebagai Ketua MPRS dan juga sebagai perwira militer aktif, di tahun 1971 inilah beliau mengakhiri karirnya di dunia pemerintahan dan ketentaraan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menguraikan pembahasan mengenai gagasan Dwifungsi ABRI yang dicetuskan oleh Jenderal A.H Nasution dan dalam upaya mengimplementasikan gagasannya. dengan judul “Peran Jenderal A.H Nasution Dalam Mewujudkan Konsep Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1971.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peran Jenderal A.H Nasution sebagai peletak dasar konsep dwifungsi ABRI. Permasalahan ini diuraikan dan dibatasi ke dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang konsep dwifungsi ABRI Jenderal A.H Nasution ?
2. Bagaimana Peran Jenderal A.H Nasution dalam mewujudkan Dwifungsi ABRI 1958-1971 ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang direncanakan ini berdasarkan perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang konsep dwifungsi ABRI Jenderal A.H Nasution.
2. Untuk mengetahui peran Jenderal A.H Nasution dalam mewujudkan dwifungsi ABRI 1958-1971.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sumber dari laporan-laporan yang memiliki ketersambungan dengan judul laporan penulis, baik dari buku, laporan skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal. Maka dalam kajian pustaka ini penulis menguraikan laporan-laporan yang menjadisumber dan memiliki ketersambungan dengan laporan ini.

1. Jurnal karya Juliani dengan judul *Militer dan Politik: Studi tentang kelompok pendukung dan penentang Terhadap Penghapusan Dwifungsi ABRI Tahun 1998-2001*. yang berisikan tentang pihak yang mendukung dan pihak yang menuntut penghapusan dwifungsi ABRI. Perbedaan dengan yang penulis uraikan bahwa yang penulis uraikan lebih menekankan kepada aspek historis gagasan Dwifungsi ABRI dan menguraikan secara kronologis upaya yang dilakukan hanya terpusat kepada Jenderal A.H Nasution secara personal selama beliau aktif didunia militer dan perpolitikan Nasional sampai Jenderal Nasution dipensiunkan Presiden Soeharto pada 1971.
2. Jurnal Karya Istiningrum dengan judul *Peran ABRI Sebagai kekuatan sosial politik pada masa orde baru tahun 1966-1998* yang berisikan tentang peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditinjau dari sejarah pembentukan ABRI. Disini sedikit ada persamaan dengan uraian penulis dari segi meninjau dari sejarah pembentukan tentara nasional. Namun, perbedaannya penulis lebih menekankan kepada aspek gagasan serta hal-hal yang bersifat personal dilakukan oleh Jenderal Nasution dari tahun 1958-1971.
3. Skripsi Karya Clara Leila Fatkhur Rizqi dengan Judul *Pemikiran A.H Nasution Tentang Dwifungsi ABRI Tahun 1958-1998*. Yang berisikan tentang konsep gagasan Dwifungsi ABRI, implementasi dan perkembangannya dari masa orde lama sampai berakhirnya era orde baru. Dalam Skripsi tersebut terdapat kesamaan dari pengambilan Tahun yang diawali dari pidato Jenderal Nasution yang berjudul *Jalan*

Tengah tahun 1958. Namun, perbedaan yang mendasar penulis memfokuskan kepada upaya-upaya Jenderal A.H Nasution dalam mewujudkan konsep Dwifungsi ABRI dibatasi selama Jenderal Nasution berada di dalam pemerintahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah. Metode berarti cara, prosedur atau teknik untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Metode bersifat praktis dengan memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur atau teknik pelaksanaannya secara sistematis. Metode Sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas aturan Ilmu Sejarah (Daliman, 2012).

Maka, jelaslah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman serta peninggalan masa lalu yang terdiri empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1975).

a. Heuristik

Tahapan ini merupakan tahapan pertama dari penelitian sejarah. Tahapan ini dapat diartikan sebagai tahapan pengumpulan sumber-sumber untuk mendapatkan data yang ada (Gottschalk, 2015).

Maka, pada tahapan ini penulis mencoba melacak atau mencari sumber yang memiliki korelasi dengan judul penelitian. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah proses pencarian, pelacakan, dan pengumpulan sumber-sumber yang berkenaan dengan topik yang akan

dibahas. Penulis menemukan sumber primeryang berupa buku, yaitu:

- 1) A.H Nasution Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1-9 Buku ini diterbitkan PT Gunung Agung Jakarta tahun 1982.
- 2) A.H Nasution Kekaryaannya ABRI Cetakan Pertama Buku ini diterbitkan oleh PT Seruling Jakarta Tahun 1977 Penulis menemukan sumber sekunder yang berupa buku.
- 3) Buku Politik Militer Indonesia 1945-1967 karya Ulf Sundhaussen yang diterbitkan oleh LP3ES Tahun 1986.
- 4) Buku Pejuang dan Prajurit: Konsepsi Implementasi Dwifungsi ABRI karya Nugroho Notosusanto yang diterbitkan Sinar Harapan Jakarta Tahun 1985.
- 5) Buku Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Politik Militer Indonesia 1958-2000 karya Salim Said yang diterbitkan PT Aksara Karunia Jakarta Tahun 2002.
- 6) Buku Militer Indonesia dan Politik: Dulu, kini, dan kelak Karya Salim Said yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2001.
- 7) Buku Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966 Karya Yahya Muhaimin yang diterbitkan Gajah Mada University Press Tahun 2005.
- 8) Buku Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 Karya Dr. Abdul Fattah yang diterbitkan LKIS Yogyakarta Tahun 2000.

b. Kritik

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kritik. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas atas sumber yang didapatkan dengan kualifikasi atas bentuk, bahan dan jenis dari naskah atau dokumen yang nantinya menentukan bagaimana validitas teks dan isi dari data-data. Kritik sumber adalah suatu usaha menganalisa, memisahkan dan mencari suatu sumber untuk

memperoleh keabsahan sumber yang dibutuhkan. Dalam hal ini, dilakukan penyeleksian apakah data tersebut akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Abdurahman, Jakarta). Tahapan kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern.

1. Kritik Eksternal

Kritik eksternal merupakan cara melakukan verifikasi ataupun pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Atas dasar berbagai alasan atau syarat, setiap sumber harus dinyatakan dahulu autentik dan integralnya. Saksi-mata atau penulis itu harus diketahui sebagai orang yang dapat dipercayai (*credible*) (Sjamsuddin, 2016).

Kritik eksternal mempersoalkan apakah sumber itu asli ataupun palsu sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, baik waktu pembuatan dokumen, bahan, atau materi dokumen. Berikut beberapa sumber dalam penelitian ini:

a) Sumber Primer

- 1) A.H Nasution Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1-9 Buku ini penulis dapatkan hasil membeli dari toko buku online yang terpercaya keasliannya. Kertas yang digunakan sudah kertas warna putih yang buram.
- 2) A.H Nasution Kekayaan ABRI Buku ini penulis dapatkan hasil membeli dari toko buku online, yang terjamin keasliannya.

b) Sumber Sekunder

- 1) Buku Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwifungsi ABRI Buku ini penulis

dapatkan hasil membeli dari toko buku online yang terpercaya keasliannya.

- 2) Buku Pejuang dan Prajurit: Konsepsi Implementasi Dwifungsi ABRI Buku ini penulis dapatkan dari hasil membeli dari toko buku online yang terpercaya keasliannya.
- 3) Buku Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi : Perkembangan Politik Militer Indonesia 1958-2000 Buku ini penulis meminjam dari Perpustakaan Batu Api Jatinangor yang terpercaya keasliannya.
- 4) Buku Militer Indonesia dan Politik: Dulu, kini, dan kelak Buku ini penulis meminjam dari Perpustakaan Batu Api Jatinangor yang terpercaya keasliannya.
- 5) Buku Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966 Buku ini penulis meminjam dari Perpustakaan Batu Api Jatinangor yang terpercaya keasliannya.
- 6) Buku Demiliterisasi Tentara : Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 Buku ini penulis dapatkan dari hasil membeli dari toko buku online yang terpercaya keasliannya.

2. Kritik Internal

Kritik internal menekankan kritik pada aspek isi dari sumber yang didapat. Setelah fakta kesaksian (*fact of testimony*) ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba gilirannya untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu, dan memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak (Sjamsuddin, 2016). Kritik intern merupakan

proses untuk menguji keabsahan sumber yang telah diperoleh sebelumnya.

Dalam kritik intern ini dilakukan 3 hal; Pertama, mengadakan penilaian intrinsik, yang berkaitan dengan kompeten tidaknya suatu sumber, keahlian dan kedekatan dari sumber atau saksi. Kedua, berkaitan dengan kemauan dari sumber untuk memberikan kesaksian dan menyampaikan kebenaran. Terakhir, korporasi yaitu pencarian sumber lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan sumber utama untuk mendukung kebenaran akan sumber utama. Setelah data atau sumber dikritik dan telah melewati tahap kolaborasi, maka data itu disebut dengan fakta sejarah. Namun apabila data atau sumber tidak bisa dilakukan korporasi, artinya sumber hanya berisi satu data saja, berlakulah prinsip argument ex silenti (Gotsschalk, 2015).

Berikut beberapa sumber dalam penelitian ini:

a) Sumber Primer

- 1) A.H Nasution Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1 Kenangan Masa Muda.

Buku ini merupakan buku Memoar Jenderal A.H Nasution. Menguraikan profil latar belakang keluarga, pengalaman masa kecil, merantau ke Sumatera Barat dan Jawa Barat, kemudian menjadi Taruna hingga keterlibatan beliau dalam membentuk TKR yang kini menjadi TNI, perjalanan karir A.H Nasution serta peristiwa yang terjadi selama beliau berada dalam pemerintahan.

- 2) A.H Nasution Kekayaan ABRI

Buku ini merupakan hasil karya beliau sendiri, yang berisi tentang bagaimana peran sosial politik ABRI

dan bagaimana peran strategis ABRI dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.

b) Sumber Sekunder

- 1) Buku Politik Militer Indonesia 1945 - 1967 menuju Dwifungsi ABRI

Buku ini merupakan buku karya salah seorang Dosen Sesko TNI yang menjelaskan sejarah panjang ABRI, bagaimana posisi politik ABRI pada masa Parlementer juga persinggungan ABRI dengan partai politik pada dekade 1950.

- 2) Buku Pejuang dan Prajurit: Konsepsi Implementasi Dwifungsi ABRI

Buku ini karya Kapusjarah ABRI dan sejarawan UI yang pernah menjadi Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto, yang menjelaskan bagaimana awal mula konsep Dwifungsi serta perkembangan yang terjadi khususnya pada masa orde baru.

- 3) Buku Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Politik Militer Indonesia 1958-2000.

Buku karya pengamat politik militer Indonesia Prof. Salim Said. menjelaskan secara kronologis sejarah bagaimana posisi politik militer di masa orde lama maupun orde baru hingga dihapuskannya Dwifungsi ABRI Tahun 2000.

- 4) Buku Militer Indonesia dan Politik: Dulu, kini, dan kelak Buku ini menjelaskan peranan politik militer Indonesia di dalam kancah Nasional, dan tokoh-tokoh yang terlibat pada masanya. Dan bagaimana kebijakan Panglima ABRI khususnya di masa orde

baru.

- 5) Buku Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945 -1966

Buku ini menjelaskan mengenai perkembangan militer di masa berdirinya hingga era demokrasi terpimpin. Di buku ini dijelaskan bagaimana peran sosial politik militer dimana disini militer mulai menyadari siapa yang menjadi kawan dan lawannya dan bagaimana sikap militer menghadapi lawan-lawan politiknya.

- 6) Buku Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945 - 2004

Buku ini menjelaskan bagaimana praktik politik yang dilakukan militer serta bagaimana pada awal mulanya militer memperoleh kepercayaan masyarakat setelah kegagalan politisi sipil pada tahun 1950-an dalam menjaga stabilitas Nasional, sehingga disitu militer muncul sebagai stabilisator dan dinamisator.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran data atau disebut juga analisis sejarah, yaitu penggabungan atas sejumlah fakta yang diperoleh. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh sebelumnya dari sumber-sumber sejarah dan bersamaan dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi secara menyeluruh (Kuntowijoyo, 2003).

Fakta-fakta sejarah dalam bentuk dokumen, buku, arsip dan peninggalan lainnya, hanya bagian dari fenomena realitas masa lalu, interpretasi bertujuan memberikan penafsiran dalam kerangka memugar suatu rekonstruksi masa lampau (Daliman, 2012).

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teori Sejarah pemikiran Kuntowijoyo, yang mempunyai tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks, kajian kontes sejarah, dan kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya. (Kuntowijoyo, 2003).

Pertama dalam kajian teks, penulis akan menelaah buku karya-karya Jenderal Nasution khususnya yang berkaitan dengan peranan dan gagasan beliau mengenai dwifungsi ABRI. Kedua, dalam kajian konteks penulis berusaha menjelaskan kondisi politik yang terjadi pada masa itu dan rentetan peristiwa yang terjadi sebagai latar belakang dari munculnya peranan Jenderal Nasution dan gagasannya mengenai dwifungsi ABRI. Ketiga kajian hubungan teks dengan masyarakat, penulis akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari gagasan dwifungsi ABRI dalam masyarakat ditinjau dari kondisi politik pada masa itu.

Kajian pembahasan ini mengenai peranan Jenderal Nasution dalam mewujudkan gagasannya sendiri mengenai konsep Dwifungsi ABRI, secara garis besarnya dwifungsi diartikan sebagai dua fungsi yaitu fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik militer. Gagasan ini banyak diperbincangkan di kalangan akademisi sebagai awal mula munculnya militer sebagai kekuatan politik legal di masa demokrasi terpimpin.

d. Historiografi

Tahapan Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik. Menulis sejarah bukan hanya sekedar Menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian.

Dalam tahapan yang terakhir ini penulis mencoba mengaitkan fakta, data dan hasil interpretasi yang akan penulis susun untuk menjadi tulisan. Adapun rencana sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang meliputi dari heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi.

BAB II merupakan bab yang membahas latar belakang konsep Dwifungsi ABRI Jenderal A, H Nasution.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang kajian konseptual, mengenai peran Jenderal A.H Nasution dalam mewujudkan konsep Dwifungsi ABRI.

BAB IV merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah. Pada bagian akhir penelitian ini terdapat sumber yang memuat informasi mengenai sumber atau referensi yang penulis pakai guna mendukung pembuatan penelitian ini; lampiran-lampiran; dan riwayat hidup penulis.

